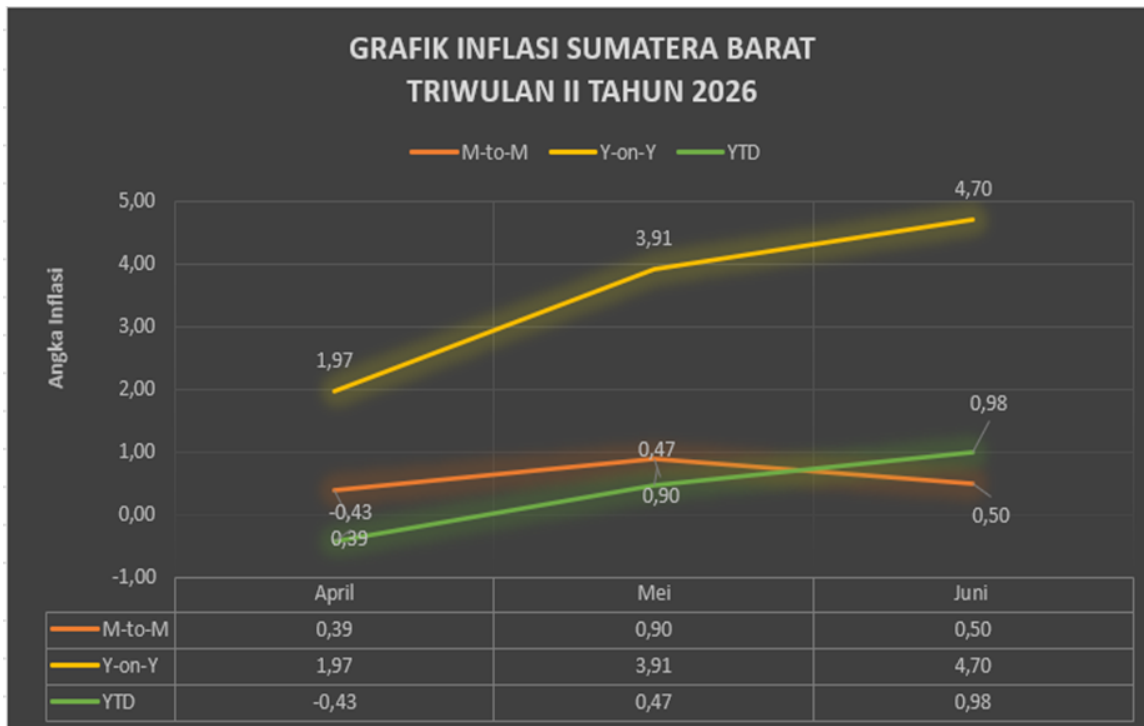


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan II Tahun 2026, sebagai berikut :

1. April 2026, Sumatera Barat tercatat inflasi sebesar 0,39% (mtm) yang disumbang dari kelompok transportasi (0,10%) dan Kelompok penyediaan makanan dan minuman/Restoran (0,12 mtm), dengan komoditas penyumbang inflasi adalah : angkutan udara sebesar 0,12% (mtm), Bawang merah sebesar 0,08%(mtm), minyak goreng 0,07%(mtm), minyak goreng sebesar 0,07%(mtm), jengkol sebesar 0,04% (mtm) dan nasi dengan lauk sebesar 0,03% (mtm). Komoditas penyumbang deflasi adalah cabe merah -0,24%(mtm), Emas perhiasan sebesar -0,06%(mtm), daging ayam ras sebesar -0,03% (mtm) dan cabai hijau -0,02% (mtm). Sedangkan secara tahunan inflasi April 2026 sebesar 1,97% (yoy), lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 2,42% (yoy).
2. Mei 2026, Sumatera Barat tercatat inflasi sebesar 0,90% (mtm) yang disumbang dari kelompok makanan, minuman dan tembakau (0,58%) dan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman Restoran (0,17%) dan kelompok Tansportasi (0,05%). Adapun komoditas penyumbang inflasi adalah cabe merah (0,40%), Bawang Merah (0,06%), nasi dengan lauk (0,05%), minyak goreng (0,04%) dan angkutan udara (0,03%) serta komoditas penyumbang deflasi adalah daging ayam ras (-0,13%), emas perhiasan (-0,05%) jengkol (-0,03), telur ayam ras (-0,02%) dan Kentang (-0,02%). Sedangkan secara tahunan inflasi Mei sebesar 3,91% (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi nasional 2026 yakni 3,08% (yoy).
3. Juni 2026, Sumatera Barat tercatat inflasi sebesar 0,50% (mtm) yang disumbang dari kelompok Makanan, minuman dan tembakau (0,40%), Transportasi (1,77%), dengan komoditas penyumbang inflasi adalah cabe merah (0,14%), bensin (0,14%), tomat (0,03%) angkutan udara (0,03%) dan bahan bakar rumah tangga (0,03%). Untuk komoditas penyumbang deflasi adalah daging ayam ras (-0,10%), telur ayam ras (-0,03%), sawi hijau (-0,01%) Buncis (-0,01%) dan kangkung (-0,01%). Sedangkan secara tahunan inflasi Juni sebesar 4,707% (yoy), lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya 3,91% (yoy).

Berikut fluktuasi inflasi Sumatera Barat pada Triwulan II tahun 2026 dapat dilihat pada grafik dibawah ini, baik secara bulanan, tahunan dan year to date, sebagai berikut :



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Selama triwulan II realisasi inflasi Sumatera Barat sangat berfluktuasi dengan trend peningkatan yang tidak terlalu signifikan dengan komoditi penyumbang adalah cabai merah, angkutan udara, bawang merah, bensin, minyak goreng, tomat dan nasi dengan lauk.

Awal April komoditi cabe merah penyumbang deflasi terbesar namun dibulan berikutnya Mei dan Juni cabe merah menjadi penyumbang utama inflasi di Sumatera Barat disamping angkutan udara dan bawang merah. Kenaikan harga cabe merah disebabkan oleh anomali cuaca karena curah hujan tinggi yang menyebabkan penurunan hasil panen dan gangguan rantai pasokan dari daerah pemasok baik dalam maupun luar provinsi dan tingginya biaya angkut dari ladang ke pasar tradisional maupun ke pasar-pasar yang ada di Sumatera Barat. Disamping itu, kenaikan harga bensin non subsidi juga mempengaruhi dan berdampak langsung terhadap sektor logistik pangan sehingga biaya distribusi dari pengumpul maupun distributor juga dengan terpaksa menaikkan tarif angkutan truk logistik untuk menutup pengeluaran bahan bakar yang pada akhirnya dibebankan langsung ke harga jual eceran di tingkat konsumen.

Demikian juga untuk angkutan udara yang sejalan dengan kenaikan harga avtur serta meningkatnya permintaan dikarenakan memasuki liburan tahun ajaran sekolah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan agar inflasi tetap terjaga, tim pengendalian inflasi Sumatera Barat selama Triwulan II tahun 2026 telah melakukan berbagai upaya, sebagai berikut :

1. Keterjangkauan Harga

1. Melaksanakan Gerakan Pasar Murah.

Melaksanakan dan menyalurkan beras SPHP.

- 2.
3. Melaksanakan sidak ke pasar dalam rangka menindaklanjuti harga minyak kita di atas HET.
4. Intervensi harga dengan memaksimalkan peran TTI center untuk melakukan intervensi harga pangan dengan memutus mata rantai distribusi dari petani langsung ke konsumen.

1. Ketersediaan Pasokan

1. Himbauan gerakan menanam di polybag kepada masyarakat dan ASN.
2. Pemberian bantuan saprodi seperti bibit cabe, sayuran dan alat pengolahan
3. Pemberian/pembagian alat pengolahan /pembagian bibit cabe, bagian bibit
4. Pengaturan pola tanam berkoordinasi dengan BMKG.
5. Pembangunan green house untuk komoditi cabe merah, bawang merah dan terkhusus di daerah sampel IHK.
6. Percepatan perbaikan jaringan irigasi terutama jaringan irigasi yang mengalami kerusakan pasca bencana hydrometeorologi.
7. Melaksanakan kerjasama antar daerah dalam provinsi maupun dengan provinsi lain.
8. Pemberian subsidi ongkos angkut bahan pangan dari daerah yang surplus ke daerah defisit.
9. Bank Indonesia menginisiasi pelaksanaan pasar murah terutama pada daerah IHK.

1. Kelancaran Distribusi

1. Melaksanakan dan memperluas Kerjasama antara daerah, baik antar daerah di dalam Provinsi maupun dengan provinsi tetangga (Jambi dan Sumsel) dengan konsep G to G dan B to B. Saat ini sedang proses KAD dengan Provinsi Lampung.
2. Percepatan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak pasca bencana hidrometeorologi.
3. Mengembangkan sistim rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan petani hingga konsumen.

2. Komunikasi Efektif

1. Mengikuti rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi yang difasilitasi Kemendagri setiap minggu;
2. Menyiapkan bahan paparan pimpinan untuk rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi;
3. Melaksanakan Rapat-rapat teknis pengendalian inflasi dengan TPID Provinsi dan TPID Kab Kota se Sumatera Barat.
4. Menerbitkan surat Gubernur Nomor 500/312/V/VI/Ro-Eko Setda/2026 tanggal 8 Juni 2026 perihal Tindak Lanjut HLM TPID Triwulan II Tahun 2026.
5. Menerbitkan surat Sekretaris Daerah Nomor 500/92/Ro-Eko Setda/IV/2026 tanggal 17 April 2026 perihal Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Triwulan I Tahun 2026.
6. Menerbitkan surat Sekretaris Daerah Nomor 500/93/Ro-Eko Setda/IV/2026 tanggal 22 April 2026 perihal Permintaan data dan Laporan kegiatan Triwulan I Tahun 2026.
7. Menerbitkan surat Sekretaris Daerah Nomor 500/114/Ro-Eko Setda/IV/2026 tanggal 4 Juni 2026 perihal Pengendalian inflasi dengan KIAT SUMBAR.
8. Selalu memantau kegiatan TPID Kabupaten Kota melalui aplikasi KIAT SUMBAR.

Memperkuat koordinasi antar TPID Provinsi dengan TPID Kab Kota, BMKG, Pelaku Usaha dan kelompok Tani dalam Pengendalian Inflasi

10. Mengoptimalkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar dalam perencanaan tanam.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dari kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan beberapa evaluasi kebijakan pengendalian inflasi Triwulan II Tahun 2026 diantaranya melalui pelaksanaan High Level Meeting, Rapat Koordinasi teknis, gerakan pangan murah, sidak pasar dan lain lain yang hasilnya dilihat dari realisasi inflasi dengan trend prositif dimana pada April 2026 inflasi Sumatera Barat 0,39% (mtm) dan sedikit berada diatas realisasi inflasi nasional, namun pada Mei 2026 inflasi Sumatera Barat mengalami kenaikan menjadi 0,90%(mtm) dan lebih tinggi dibanding inflasi nasional serta pada bulan Juni 2026 inflasi sebesar 0,50%. Sedangkan secara tahunan inflasi Sumatera Barat sebesar 4,70% (yoy) lebih tinggi dari nasional sebesar 3,34 % (yoy) serta secara tahun kalender inflasi Sumatera Barat sebesar 0,98% (ytd) dan berada dibawah nasional.

Pelaksanaan strategis 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) sangat efektif dilakukan dengan melaksanakan gerakan pangan murah dan operasi pasar secara masif di Kabupaten Kota dan terbukti membantu dalam menstabilkan harga, memanfaatkan kendaraan box TTIC untuk GPM keliling dengan memperluas jangkauan intervensi ke daerah daerah yang sulit diakses. Untuk ketersediaan pasokan dengan pemanfaatan dan pembangunan green house untuk cabe merah dan bawang merah terutama di daerah sampel inflasi (IHK) serta mengatasi ketergantungan pada musim tanam konvensional. Selain itu, menggalakan gerakan menanam di polybag bagi ASN dan masyarakat untuk menekan permintaan pasar pada komoditas hortikultura. Pada strategi kelancaran distribusi dengan melakukan perbaikan infrastruktur jalan yang rusak menjadi kunci utama dalam menjaga arus pasokan tetap lancar terutama pasca bencana alam. Selain perbaikan infrastruktur jalan juga mengoptimalkan realisasi kerjasama dengan provinsi tetangga serta mengevaluasi KAD KAD yang sudah disepakati dan belum ada tindak lanjut. Selanjutnya pada strategis komunikasi efektif dengan mengoptimalkan koordinasi yang intensif antara sesama tim TPID provinsi dan TPID Kab Kota se Sumatera Barat serta instansi/lembaga terkait.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dari beberapa kegiatan pengendalian inflasi selama triwulan II Tahun 2026 beberapa rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah berdasarkan strategi 4 , sebagai berikut:

A. Keterjangkauan Harga

1. Tetap melaksanakan Gerakan Pasar Murah yang rutin dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi.
2. Melaksanakan dan menyalurkan beras SPHP.
3. Melaksanakan sidak ke pasar dalam rangka menindaklanjuti harga minyak kita di atas HET.
4. Intervensi harga dengan memaksimalkan peran TTI center untuk melakukan intervensi harga pangan dengan memutus mata rantai distribusi dari petani langsung ke

konsumen.

B. Ketersediaan Pasokan

1. Himbauan gerakan menanam di polybag kepada masyarakat ASN.
2. Pemberian bantuan saprodi seperti bibit cabe, sayuran dan alat pengolahan.
3. Pembangunan green house untuk komoditi cabe merah, bawang merah dan terkhusus di daerah sampel IHK.
4. Percepatan perbaikan jaringan irigasi terutama jaringan irigasi yang mengalami kerusakan pasca bencana hydrometeorologi.
5. Melaksanakan kerjasama antar daerah dalam Provinsi maupun dengan provinsi lain.
6. Pemberian subsidi angkut bahan pangan dari daerah yang surplus ke daerah defisit.
7. Bank Indonesia menginisiasi pelaksanaan pasar murah terutama pada daerah IHK.
8. Mengaktifkan sistim resi gudang untuk beras dan jagung
9. Memanfaatkan cold storage untuk menyimpan bahan pangan saat produksi berlebih.
10. Berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam optimalisasi pemanfaatan green house untuk cabe merah dan bawang merah.

C. Kelancaran Distribusi

1. Melaksanakan dan memperluas Kerjasama antara daerah, baik antar daerah di dalam Provinsi maupun dengan provinsi tetangga (Jambi dan Sumsel) dengan konsep G to G dan B to B. Saat ini sedang proses KAD dengan Provinsi Lampung.
2. Percepatan perbaikan jalan dan jembatan yang rusak pasca bencana hidrometeorologi.
3. Mengembangkan sistim rantai pasok terintegrasi yang menghubungkan petani hingga konsumen.
4. Memberikan subsidi ongkos angkut terutama untuk daerah yang sulit dijangkau guna mengantisipasi disparitas harga yang tinggi di wilayah tersebut.
5. Pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk memastikan kelancaran distribusi bahan pangan di jalur jalur utama distribusi dan memastikan tidak hambatan pasokan.

D. Komunikasi Efektif

1. Menyediakan sistim informasi data dan harga pangan yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
2. Melakukan pembinaan rutin kepada petugas E-numerator pangan agar data yang dihasilkan lebih akurat, tepat waktu, tepat sasaran sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan
3. Melaksanakan rapat koordinasi rutin baik Provinsi dan kab Kota.
4. Mematuhi dan melaksanakan rencana aksi pada setiap kebijakan pengendalian inflasi yang diterbitkan melalui surat-surat Gubernur.
5. Mengikuti rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi yang difasilitasi Kemendagri setiap minggu;
6. Menyiapkan bahan paparan pimpinan untuk rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi;
7. Melaksanakan Rapat-rapat teknis pengendalian inflasi dengan TPID Provinsi dan TPID Kab Kota se Sumatera Barat.
8. Selalu memantau kegiatan TPID Kabupaten Kota melalui aplikasi KIAT SUMBAR.
9. Memperkuat koordinasi antar TPID Provinsi dengan TPID Kab Kota, BMKG, Pelaku Usaha dan kelompok Tani dalam Pengendalian Inflasi

Mengoptimalkan informasi perkiraan cuaca dari BMKG sebagai dasar dalam

10.

perencanaan tanam.

-